

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN

Hubungi Kami

0343-42013

bakesbangpolkotapas@gmail.com

www.bakesbangpol.pasuruankota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 8
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja..... 8
2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026..... 11
2.3 Telaahpokok-pokok Pikiran DPRD..... 16
2.4 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 17
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN Perangkat Daerah..... 18
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027..... 18
3.2 Arah Kebijakan 20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 22
BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 37
5.1 Indikator Kinerja Utama..... 37
5.2 Indikator Kinerja Kunci..... 37
BAB VI PENUTUP..... 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026. Dokumen ini memuat perubahan kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, pagu anggaran, serta kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun berjalan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran teknis dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renja merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Perubahan RKPD Tahun 2026, dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029. Selain itu, Perubahan Renja menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan semester pertama tahun berjalan, perkembangan kondisi aktual, perubahan asumsi perencanaan, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap target kinerja dan alokasi anggaran. Dengan demikian, Perubahan Renja diharapkan mampu menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-281 tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2026. Perubahan Renja ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah serta merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029.

Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran dengan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2026 serta kebijakan pembangunan daerah yang berlaku.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2026.
3. Menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Bakesbangpol, proses penyusunan Perubahan Renja, keterkaitan antara Perubahan Renja Bakesbangpol dengan dokumen P-RKPD dan Renstra Bakesbangpol, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perubahan Renja Bakesbangpol.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Bakesbangpol serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2026 hingga Triwulan II

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

2.3 Telaah pokok-pokok Pikiran DPRD

2.4 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 Memuat tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026).

3.2 Arah Kebijakan Memuat arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemutakhiran RKP Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2026, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

2026 hingga triwulan II.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Memuat Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II secara umum telah berjalan sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang berlaku serta dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), serta capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, kendala, permasalahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama Tahun 2026.

Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026, khususnya dalam melakukan penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, lokasi, pagu anggaran, maupun pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta perkembangan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan adalah Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleran dan Rukun, yang diukur melalui indikator Indeks Keharmonisan Sosial. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 59,83 dan terealisasi sebesar 59,13, sehingga capaian kinerjanya mencapai 98,83%. Nilai tersebut merupakan hasil pengukuran terhadap tiga indeks pembentuk, yaitu Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas, dan Indeks Konflik Sosial. Belum tercapainya target disebabkan oleh belum optimalnya capaian pada Indeks Toleransi. Pada Tahun 2026, target Indeks Keharmonisan Sosial ditetapkan sebesar 60,00. Sampai dengan Triwulan II, capaian indikator belum dapat dihitung karena merupakan akumulasi dari tiga

indeks pembentuk, sementara dua di antaranya belum dapat diukur pada periode tersebut. Oleh karena itu, realisasi indikator akan diketahui setelah seluruh indeks pembentuk tersedia pada akhir tahun.

2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

   a. Indeks Toleransi
      Pada Tahun 2025, Indeks Toleransi ditargetkan sebesar 89,50 dan terealisasi sebesar 86,81, sehingga capaian kinerjanya mencapai 96,99%. Indeks ini diukur berdasarkan dua dimensi, yaitu relasi antar manusia serta etika dan budi pekerti, yang menggambarkan tingkat penerimaan terhadap perbedaan, sikap saling menghormati, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa penguatan nilai toleransi di masyarakat masih perlu terus ditingkatkan, meskipun capaian indikator telah mendekati target yang ditetapkan. Pada Tahun 2026, target Indeks Toleransi ditetapkan sebesar 90,00 sampai dengan Triwulan II, realisasi Indeks Toleransi belum tersedia karena pengukuran indikator dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun.
   b. Indeks Keterlibatan Komunitas
      Pada Tahun 2025, Indeks Keterlibatan Komunitas ditargetkan sebesar 45 dan terealisasi sebesar 50, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran tingkat keterlibatan komunitas dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun. Realisasi yang melampaui target menunjukkan meningkatnya partisipasi komunitas dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Pada Tahun 2026, target Indeks Keterlibatan Komunitas ditetapkan sebesar 47. Sampai dengan Triwulan II, indikator tersebut belum memiliki realisasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun berdasarkan akumulasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.
   c. Indeks Konflik Sosial
      Pada Tahun 2025, Indeks Konflik Sosial ditargetkan sebesar 45 dan terealisasi sebesar 40,59. Indikator ini merupakan indikator dengan tren negatif, sehingga semakin rendah nilai indeks menunjukkan kondisi yang semakin baik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kondisi konflik sosial di Kota Pasuruan relatif terkendali, didukung oleh upaya deteksi dini, koordinasi, dan penanganan potensi konflik melalui PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi) bersama unsur terkait. Pada Tahun 2026, target Indeks Konflik Sosial ditetapkan sebesar 43. Sampai

dengan Triwulan II, indikator ini terealisasi sebesar 32,94. Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat sementara karena perhitungan indeks bersifat kumulatif dan akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi konflik sosial hingga akhir Tahun 2026.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan belum memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, tidak terdapat capaian IKK yang dapat disajikan dalam evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator IKU	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi 2026 s/d TB II	Catatan Analisa
	IKU						
1	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83	59,13	60,00	-	Terealisasi di TB IV
2	Indeks Toleransi	Indeks	89,5	86,81	90	-	Target Tahun 2025 belum tercapai. Realisasi Tahun 2026 belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun.
3	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	45	50	47	-	Target Tahun 2025 tercapai. Realisasi Tahun 2026 belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun.
4	Indeks Konflik Sosial	Indeks	45	40,59	43	32,94	Realisasi Triwulan II sebesar 32,94, lebih baik dari target (indikator tren negatif). Capaian masih bersifat sementara dan dapat berubah hingga akhir tahun.
	IKK						
	N I H I L	-	-	-	-	-	

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2026

Identifikasi permasalahan dan isu strategis tersebut dilakukan sebagai dasar dalam menentukan prioritas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Tahun 2026. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, permasalahan dan isu strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra masih relevan dan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan sebagai dasar penyesuaian program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2026.

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila.
b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi.
c. Belum optimalnya deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas politik dan keamanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang masih relevan untuk menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Ketahanan Ideologi Pancasila, melalui peningkatan literasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme

di kalangan masyarakat.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi, melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas.
c. Peningkatan Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik Sosial, melalui penguatan koordinasi, sinergi, dan jejaring deteksi dini bersama pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan selama semester pertama Tahun Anggaran 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja perangkat daerah, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, urusan ini diselenggarakan melalui 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 6.619.607.598,- dan sampai dengan Tribulan II tahun 2026, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 3.425.558.734. Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap target RKPD, mencapai kinerja outcome sebesar 29,87 % dengan capaian keuangan 51,75%. Capaian kinerja Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sampai dengan Triwulan II adalah dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 20 subkegiatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah dengan target 3 serta Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 78,80 pada Tahun 2026.

   Pada Triwulan II, capaian kinerja indikator tersebut masih 0, dengan serapan anggaran sebesar 46,61%. Hal ini disebabkan karena penilaian SAKIP dan SPIP belum dilaksanakan pada periode Triwulan II, sehingga capaian indikator belum dapat diukur dan ditetapkan pada tahap ini. Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp.

1.789.386.116 dengan capaian 46,61%.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan. Pencapaian program diukur melalui indikator Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada Tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Namun, sampai dengan Triwulan II, kegiatan pembinaan kepada masyarakat belum dilaksanakan sehingga indikator kinerja program belum dapat diukur dan capaian kinerja masih sebesar 0%.

Sementara itu, realisasi anggaran Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan telah mencapai Rp68.090.773,00 atau sebesar 12,63%. Perbedaan antara capaian kinerja yang masih sebesar 0% dengan realisasi anggaran yang telah terealisasi disebabkan karena telah dimulainya pelaksanaan tahapan kegiatan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA). Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut belum memberikan kontribusi terhadap pengukuran indikator kinerja program, karena indikator yang digunakan secara khusus mengukur persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, sehingga capaian kinerja program baru dapat diukur setelah kegiatan pembinaan masyarakat dilaksanakan.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan. Pencapaian program diukur melalui indikator Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik pemilih pemula.

Pada Tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan sebesar 73,30%. Namun, sampai dengan Triwulan II, kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada lembaga pendidikan belum dilaksanakan sehingga indikator kinerja program belum dapat diukur dan capaian kinerja masih sebesar 0%.

Sementara itu, realisasi anggaran Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik telah mencapai Rp1.001.320.000,00. Perbedaan yang signifikan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja program disebabkan

karena realisasi anggaran tersebut berasal dari penyaluran hibah bantuan keuangan kepada partai politik (Banpol). Meskipun penyaluran hibah Banpol merupakan bagian dari pelaksanaan program, kegiatan tersebut tidak berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja program yang mengukur persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja program masih sebesar 0% dan baru dapat diukur setelah pelaksanaan kegiatan pendidikan politik pada lembaga pendidikan.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan. Pencapaian program ini diukur melalui indikator Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister.

Pada Tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister sebesar 89%. Hingga Triwulan II, realisasi kinerja telah mencapai 86,91%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 97,65%, sementara serapan anggaran masih 0%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah organisasi masyarakat yang telah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar/Teregistrasi) dari Kementerian yaitu 445 dengan jumlah organisasi masyarakat yang terdata di Bakesbangpol yaitu 512. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh angka sebesar 86,91%. Adanya perbedaan antara capaian kinerja dan serapan anggaran disebabkan karena pencapaian indikator dapat dilakukan tanpa memerlukan biaya, yaitu melalui kegiatan pendataan organisasi masyarakat serta proses penerbitan surat keterangan teregister yang dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran. Realisasi anggaran pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah Rp. 0 dengan capaian 0%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan. Pencapaian program diukur melalui indikator Persentase lembaga ekonomi, sosial, dan budaya (Ekososbud) yang dibina.

Pada Tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan sebesar 36,08%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi kinerja telah mencapai 4,12% sehingga capaiannya 11,42% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi anggaran mencapai Rp70.677.780,00 atau sebesar 51,29%.

Perbedaan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran

disebabkan karena sebagian besar anggaran telah digunakan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan program. Namun, kegiatan pembinaan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar dari berbagai lembaga ekonomi, sosial, dan budaya baru akan dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran (PAK) pada Triwulan III. Oleh karena itu, kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja program hingga Triwulan II masih relatif rendah, meskipun realisasi anggaran telah mencapai lebih dari 50%.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SOSIAL

   Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan. Pencapaian program ini diukur melalui indikator Persentase potensi konflik yang terselesaikan.

   Pada Tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Pada Triwulan II, realisasi kinerja mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%, dengan serapan anggaran sebesar Rp 496.084.065 dan capaian 59,03%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah potensi konflik yang terselesaikan yaitu 34 dengan total potensi konflik yaitu 34. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh angka sebesar 100%

   Perbedaan antara capaian kinerja dan serapan anggaran terjadi karena pencapaian indikator program dapat dilakukan tanpa memerlukan biaya besar, yaitu melalui pendataan potensi konflik yang terselesaikan dengan berkolaborasi bersama kelurahan. Sementara itu, realisasi anggaran digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial, seperti kegiatan PUSKOMIN dan rapat koordinasi bersama FORKOPIMDA dalam rangka membahas isu-isu konflik menonjol yang muncul di masyarakat.

Faktor Pendorong:

a. Adanya dukungan koordinasi internal perangkat daerah serta keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Tersedianya data pendukung dan mekanisme pendataan yang berjalan secara rutin sehingga capaian indikator tertentu dapat diperoleh lebih cepat meskipun tanpa membutuhkan anggaran.
c. Pelaksanaan sebagian subkegiatan telah berjalan sesuai jadwal sehingga tetap mendorong serapan anggaran meskipun belum berdampak langsung pada indikator utama program.

Faktor Penghambat:

a. Terdapat ketidaksesuaian antara capaian kinerja dan serapan

anggaran karena sebagian target indikator dapat dicapai melalui kegiatan administratif/pendataan yang tidak memerlukan biaya.

b. Masih terdapat subkegiatan yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap indikator program sehingga serapan anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

2.3 Telaah Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang telah diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2026.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026, Pokok-Pokok Pikiran DPRD ditelaah kembali dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan. Hasil telaahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Perubahan Renja Tahun 2026.

Adapun Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Telaah Pokok - Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
1	Sutirta, SE	Pendidikan politik bagi Sekolah	Warga Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	2	Kegiatan	Rp13.900.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
2	Sutirta, SE	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Warga Kota Pasuruan, Kota Pasuruan	10	Kegiatan	Rp46.745.990	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Berdasarkan hasil telaahan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan masih relevan dengan prioritas pembangunan daerah serta tetap dipertahankan dalam Perubahan Renja Tahun 2026.

2.4 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sampai dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026, perangkat daerah belum memiliki inovasi pada bidang urusan yang telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, upaya pengembangan inovasi terus dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.

Salah satu inovasi yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan. Pengembangan inovasi tersebut direncanakan mulai dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 tetap selaras dengan arah kebijakan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga terjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan perangkat daerah.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan adalah meningkatnya keharmonisan sosial, yang diukur melalui Indeks Keharmonisan Sosial. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran, yaitu meningkatnya toleransi masyarakat dengan indikator Indeks Toleransi, meningkatnya keterlibatan komunitas dengan indikator Indeks Keterlibatan Komunitas, serta menurunnya konflik sosial di masyarakat dengan indikator Indeks Konflik Sosial.

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, dengan tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, capaian kinerja hingga Triwulan II menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran masih relevan dan dapat dicapai sampai akhir tahun, sehingga target indikator dalam Perubahan Renja Tahun 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya, target indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026	Catatan Analisa
	TUJUAN							
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,13	60	60	60	Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, target Indeks Keharmonisan Sosial masih relevan dan diproyeksikan dapat dicapai pada akhir tahun. Oleh karena itu, target pada Perubahan Renja Tahun 2026 tetap sebesar 60 sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun 2026.
	SASARAN							
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	86,81	90	90	90	Capaian kinerja menunjukkan kondisi toleransi masyarakat masih terjaga dengan baik dan berbagai kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, serta pendidikan politik tetap berjalan sesuai rencana. Target indikator dipandang masih realistis sehingga tidak dilakukan perubahan dan tetap sebesar 90.
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	50	47	47	47	Hasil evaluasi menunjukkan partisipasi komunitas dalam kegiatan pembinaan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Capaian tahun sebelumnya telah melampaui target, sehingga target Tahun 2026 sebesar 47 dinilai masih realistis dan dipertahankan dalam Perubahan Renja.
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	Indeks	40,59	43	43	43	Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi hingga Triwulan II Tahun 2026, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif serta upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik terus dilaksanakan. Target Indeks Konflik Sosial tetap sebesar 43 karena masih sesuai dengan proyeksi capaian akhir tahun dan arah kebijakan dalam Renstra.

Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, pada Perubahan Renja Tahun 2026 tidak terdapat penetapan maupun perubahan target Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026	Catatan Analisa
	N I H I L						

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2026 tetap mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2026, dan kebijakan nasional maupun daerah lainnya yang relevan. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan serta memastikan program dan kegiatan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan pada Perubahan Renja Tahun 2026 tetap difokuskan pada:

1. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat.
3. Penguatan peran FKUB, FKDM, serta forum dan mitra strategis lainnya.
4. Peningkatan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Peningkatan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat.

6. Penataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta partai politik.
7. Penguatan kerukunan dan dialog lintas sektor.
8. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Melalui arah kebijakan tersebut diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tetap mampu mendukung terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan keharmonisan sosial sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian dilakukan terhadap komponen yang memerlukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan perkembangan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan, sedangkan program dan kegiatan yang masih relevan tetap dipertahankan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tetap difokuskan pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat, penguatan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 terdiri atas 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 program teknis, 13 Kegiatan dan 34 sub Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program-program tersebut menjadi instrumen dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.
2. Pada Perubahan Renja Tahun 2026 terdapat subkegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar rekening untuk mendukung kelancaran pelaksanaan subkegiatan serta memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja. Subkegiatan yang mengalami pergeseran anggaran tersebut adalah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 sebesar

Rp 6.746.601.998 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 tersaji pada tabel berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PASURUAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.706.405.489,00**	**6.669.726.098,00**	**6.746.601.998,00**	**-1.959.803.491,00**							**9.217.704.100,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**8.706.405.489,00**	**6.669.726.098,00**	**6.746.601.998,00**	**-1.959.803.491,00**							**9.217.704.100,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**8.706.405.489,00**	**6.669.726.098,00**	**6.746.601.998,00**	**-1.959.803.491,00**							**9.217.704.100,00**	
1,	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah**				**3 78.80 Level Nilai 78.80 3 Nilai Level**	**3 78.80 Level Nilai 78.80 3 Nilai Level**	**3.952.804.891,00**	**3.886.494.910,00**	**3.847.634.010,00**	**-105.170.881,00**					**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan**		**4.111.655.218,00**	
		[Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	***Level maturitas SPIP PD Nilai SAKIP OPD***	***3 83.50***	***3 77.60***	***3 77.70***			***3.882.386.291,00***	***3.858.069.970,00***	***3.846.631.070,00***	***-35.755.221,00***						***3 78.80***	***4.035.896.038,00***	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	13 Dokumen	26.620.500,00	7.631.700,00	7.631.700,00	-18.988.800,00							39.729.585,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	7 Dokumen	22.134.100,00	6.077.900,00	6.077.900,00	-16.056.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			34.978.755,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	2.299.600,00	810.680,00	810.680,00	-1.488.920,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			2.414.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	2.186.800,00	743.120,00	743.120,00	-1.443.680,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			2.336.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	3.013.685.641,00	3.441.228.910,00	3.480.924.410,00	467.238.769,00							3.134.936.975,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.982.467.041,00	3.421.803.970,00	3.461.499.470,00	479.032.429,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			3.102.157.445,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				16 Laporan	17 Laporan	31.218.600,00	19.424.940,00	19.424.940,00	-11.793.660,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			32.779.530,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan				4 Laporan	4 Laporan	35.511.400,00	7.392.100,00	7.392.100,00	-28.119.300,00							37.120.545,00	
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	35.511.400,00	7.392.100,00	7.392.100,00	-28.119.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			37.120.545,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	1.800.000,00	721.680,00	721.680,00	-1.078.320,00							1.890.000,00	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.800.000,00	721.680,00	721.680,00	-1.078.320,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			1.890.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	142.607.500,00	35.535.220,00	33.493.920,00	-109.113.580,00							154.245.420,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	1 Paket	7.969.900,00	2.546.300,00	2.546.300,00	-5.423.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			8.081.010,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	4.275.320,00	4.275.320,00	-10.724.680,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			15.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	6 Dokumen	2.204.400,00	994.200,00	994.200,00	-1.210.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			2.314.620,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			5.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				4 Laporan	4 Laporan	13.433.400,00	4.753.900,00	7.712.600,00	-5.720.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			18.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	4 Laporan	98.999.800,00	20.965.500,00	15.965.500,00	-83.034.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			103.949.790,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan				5 unit	0 unit	156.891.600,00	20.173.400,00	0,00	-156.891.600,00							148.931.160,00	
	8.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	0 Unit	78.445.800,00	10.086.700,00	0,00	-78.445.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			74.465.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	0 Unit	78.445.800,00	10.086.700,00	0,00	-78.445.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			74.465.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	364.788.250,00	259.755.900,00	231.184.200,00	-133.604.050,00							381.079.650,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	92.933.000,00	90.658.000,00	61.049.200,00	-31.883.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			97.579.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	271.855.250,00	169.097.900,00	170.135.000,00	-101.720.250,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			283.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara				29 Unit	25 Unit	210.900.000,00	114.056.000,00	86.286.000,00	-97.192.000,00							213.721.883,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	44.370.000,00	27.422.000,00	27.422.000,00	-16.948.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			46.588.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	7 Unit	70.160.000,00	43.456.000,00	43.456.000,00	-26.704.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			64.849.733,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.00006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	16 Unit	12.800.000,00	6.756.000,00	6.408.000,00	-6.392.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			12.715.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.00009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	39.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-30.200.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			42.979.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**998.471.400,00**	**541.646.000,00**	**539.036.200,00**	**-459.435.200,00**					**Masyarakat Kota Pasuruan**		**1.037.407.350,00**	
		[Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan]	***Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***95***	***15***	***0***			***998.471.400,00***	***541.646.000,00***	***539.036.200,00***	***-459.435.200,00***						***90***	***1.037.407.350,00***	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				80 Persen	80 Persen	998.471.400,00	541.646.000,00	539.036.200,00	-459.435.200,00							1.037.407.350,00	
	8.01.02.2.01.00004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				50 Orang	0 Orang	15.553.000,00	4.989.800,00	0,00	-15.553.000,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			5.343.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				74 Orang	76 Orang	982.918.400,00	536.656.200,00	539.036.200,00	-443.882.200,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			1.032.064.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik pemilih pemula**				**73.3 Persen**	**73.3 Persen**	**1.433.054.598,00**	**1.228.121.600,00**	**1.228.121.600,00**	**-204.932.998,00**					**Kelompok pemilih pemula, Partai politik dan masyarakat**		**1.504.707.327,00**	
		[TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK]	***Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik***	***100***	***0***	***0***			***1.433.054.598,00***	***1.228.121.600,00***	***1.228.121.600,00***	***-204.932.998,00***						***100***	***1.504.707.327,00***	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan di bidang politik yang terimplementasikan				100 Persen	100 Persen	1.433.054.598,00	1.228.121.600,00	1.228.121.600,00	-204.932.998,00							1.504.707.327,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*				1 Dokumen	3 Dokumen	1.244.638.100,00	1.214.221.500,00	1.214.221.500,00	-30.416.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			1.306.870.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				85 Orang	60 Orang	188.416.498,00	13.900.100,00	13.900.100,00	-174.516.398,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			197.837.322,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister**				**89 Persen**	**89 Persen**	**311.859.400,00**	**35.302.998,00**	**153.649.598,00**	**-158.209.802,00**					**Organisasi Masyarakat Kota Pasuruan**		**327.452.370,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan]	***Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif***	***73.5***	***2***	***0***			***311.859.400,00***	***35.302.998,00***	***153.649.598,00***	***-158.209.802,00***						***71.5***	***327.452.370,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mengikuti pembinaan Organisasi Kemasyarakatan				20 Persen	20 Persen	311.859.400,00	35.302.998,00	153.649.598,00	-158.209.802,00							327.452.370,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				175 Orang	100 Orang	97.857.000,00	24.407.498,00	142.754.098,00	44.897.098,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			102.749.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				86 Orang	20 Orang	206.862.500,00	9.859.900,00	9.859.900,00	-197.002.600,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			217.205.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	7.139.900,00	1.035.600,00	1.035.600,00	-6.104.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			7.496.895,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase lembaga ekososbud yang dibina**				**36,08 Persen**	**36,08 Persen**	**394.796.800,00**	**137.797.390,00**	**137.797.390,00**	**-256.999.410,00**					**Lembaga ekososbud di Kota Pasuruan**		**414.536.640,00**	
		[MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA]	***Persentase lembaga ekososbud yang aktif***	***14***	***0***	***0***			***394.796.800,00***	***137.797.390,00***	***137.797.390,00***	***-256.999.410,00***						***14***	***414.536.640,00***	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase lembaga ekosobud yang mengikuti sosialisasi bahaya narkoba				51,54 Persen	51,54 Persen	394.796.800,00	137.797.390,00	137.797.390,00	-256.999.410,00							414.536.640,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				38 Orang	20 Orang	8.771.100,00	2.819.300,00	2.819.300,00	-5.951.800,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			9.209.655,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				250 Orang	540 Orang	333.159.600,00	110.802.490,00	110.802.490,00	-222.357.110,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			349.817.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	52.866.100,00	24.175.600,00	24.175.600,00	-28.690.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			55.509.405,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi konflik yang terselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.615.418.400,00**	**840.363.200,00**	**840.363.200,00**	**-775.055.200,00**					**Masyarakat Kota Pasuruan**		**1.821.945.195,00**	
		[Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial]	***Persentase potensi konflik yang terselesaikan***	***100***	***100***	***100***			***1.615.418.400,00***	***840.363.200,00***	***840.363.200,00***	***-775.055.200,00***						***100***	***1.821.945.195,00***	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang mengikuti keg. Pembinaan Kewaspadaan Dini				90 Persen	90 Persen	1.615.418.400,00	840.363.200,00	840.363.200,00	-775.055.200,00							1.821.945.195,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	112.543.500,00	83.928.200,00	83.928.200,00	-28.615.300,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			207.504.675,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				50 Orang	40 Orang	14.874.500,00	4.768.200,00	4.768.200,00	-10.106.300,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			15.618.225,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	1.342.585.500,00	626.787.400,00	626.787.400,00	-715.798.100,00	Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			1.446.136.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	145.414.900,00	124.879.400,00	124.879.400,00	-20.535.500,00	Kota Pasuruan, Panggungrejo, Pekuncen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial			152.685.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH								**8.706.405.489,00**	**6.669.726.098,00**	**6.746.601.998,00**	**-1.959.803.491,00**							**9.217.704.100,00**	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 serta Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026. Penetapan indikator dan target kinerja juga mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sehingga tetap selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan masih relevan sehingga tidak terdapat perubahan terhadap indikator maupun target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026. Selanjutnya, Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target P Renja 2026
Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,13	60	60	60
Indeks Toleransi	Indeks	86,81	90	90	90
Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	50	47	47	47
Indeks Konflik Sosial	Indeks	40,59	43	43	43

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena

itu, pada Perubahan Renja Tahun 2026 tidak terdapat penetapan maupun perubahan target Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2026	Target Renja 2026	Target Renja 2026
	N I H I L					

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, serta mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2026. Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan selama sisa tahun anggaran 2026 agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Melalui Perubahan Renja Tahun 2026 diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2026 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Pasuruan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pasuruan, 01 September 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pasuruan

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.197012231990031001